# BAB II

# KERANGKA KONSEPTUAL

## A. Teori Neo Liberalisme

### i. Asumsi Dasar Neo Liberalisme

Asumsi dasar Neoliberalisme yang *pertama*, adalah Hukum pasar, kebebasan bagi modal, barang dan jasa, sehingga pasar bisa mengatur dirinya sendiri agar gagasan "tetesan ke bawah" dapat mendistribusikan kekayaan. Juga mencakup upaya agar tenaga kerja tak diwakili serikat buruh, dan menyingkirkan semua hambatan yang menghalangi mobilitas modal, seperti peraturan – peraturannya. Kebebasan tersebut harus diberikan oleh negara atau pemerintah jadi pasarlah yang berkuasa dan penentu. *Kedua*, Mengurangi pembelanjaan publik bagi pelayanan – pelayanan sosial, seperti pelayanan kesehatan dan pendidikan yang disediakan oleh pemerintah. *Ketiga*, Deregulasi, agar kekuatan pasar bisa bekerja menurut mekanisme aturannya sendiri. *Keempat*, Mengubah persepsi baik tentang publik dan komunitas menjadi individualisme dan tanggung jawab individual.[1]

Pada dasarnya neo-liberalisme adalah sebuah reaksi terhadap membesarnya peran negara yang menyebabkan kehancuran sistem pasar. Jalan keluar yang diusulkan oleh ideologi neo-liberalisme adalah melucuti peran negara dan mengembalikan semua transaksi ekonomi ke dalam hukum pasar. Sehingga

[1] Martinez, Elizabeth & Arnoldo Garcia, What is "Neoliberalism"?, National Network for Immigrant and Refugees Rights, Januari, 1997



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ketika Indonesia terjatuh pada krisis, neo-liberalisme memberikan beberapa penjelasan tentang sebab-musababnya.[2]

**ii. Sejarah Munculnya Neo Liberalisme**

Awal munculnya neoliberalisme di latar belakangi oleh hancurnya *"liberalism".* Liberalisme dianggap gagal karena ternyata belum juga berhasil mengangkat kemiskinan umat manusia. Seiring dengan hancurnya liberalisme, pada tahun 1973 terjadi krisis minyak: mayoritas negara penghasil minyak Timur Tengah (TT) melakukan embargo terhadap Amerika Serikat dan sekutunya serta melipat-gandakan harga minyak dunia. Hal ini dilakukan oleh TT sebagai bukti "reaksi" mereka terhadap AS yang mendukung Israel dalam perang Yom Kippur. Keputusan TT ini ditanggapi serius oleh para elit politik negara – negara sekutu AS dan mereka pun saling berselisih paham sehubungan dengan angka pertumbuhan ekonomi, beban bisnis, beban biaya – biaya sosial demokrat (biaya-biaya fasilitas negara untuk rakyatnya). Pada situasi inilah ide – ide libertarian sebagai wacana menjadi dominan, tidak hanya di tingkat nasional tetapi juga ditingkat global di IMF dan *World Bank* (WB), dan WTO.[3]

Pendekatan neoliberalis yang merupakan "anak" dari pendekatan liberalis melihat isu – isu internasional dengan fokus kerja sama atau koperasi. Neo-liberalisme merupakan gagasan yang terkait dengan upaya untuk kembali pada kebijakan ekonomi liberal klasik yang diusung oleh Adam Smith dan David

[2] Eko Prasetyo, *Kapitalisme dan Neoliberalisme*, Ekonomi Politik Journal Al-Manaar, Edisi I/2014, h.4
[3] Yulius P. Hermawan, *Transformasi dalam Studi Hubungan Internasional*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), h.103-104

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ricardo. Neoliberalisme bisa ditandai dengan gagasan yang lebih menekankan pada deregulasi atau peraturan pasar, ketidakbukaan badan usaha milik negara (BUMN), campur tangan pemerintah yang terbatas, serta pasar internasional yang lebih terbuka. Neoliberalisme lebih merupakan kebijakan ekonomi daripada sekedar sebuah perspektif ekonomi politik.[4] Smith menganjurkan pemerintah memberikan kebebasan ekonomi kepada rakyat dalam bingkai perdagangan bebas baik dalam ruang lingkup domestik maupun internasional.

Neoliberalisme berasal dari kata *liberal* dan *isme* di sini menunjukkan aliran atau paham. Dalam kamus besar Oxford, liberalisme diartikan sebagai *"....that believes in a global free market, without goverment regulation, with bussinesses and industri controled and run for profit by private owners".*[5] Atau dalam Kamus Ilmiah Populer, Liberalisme diartikan "*suatu sistem perekonomian yang mengutamakan kebebasan individu untuk mengadakan perjanjian terhadap semua macam barang"*

Dari pengertian di atas bisa diambil penjelasan bahwa *neoliberalisme* menolak campur tangan negara dalam urusan ekonomi, karena mereka yang mengikuti paham ini menganggap campur tangan negara pada akhirnya akan mendistorsi atau memutarbalikkan fakta pasar dan membuatnya tidak efisien dan tidak sesuai kenyataan. Karenanya, liberalisasi dan privatisasi menjadi ciri penting dalam kebijakan neoliberalisme pada tingkat domestik.[6]

---

[4] Apridar, *Ekonomi Internasional (Sejarah, Teori, Konsep dan Permasalahan dalam Aplikasinya)*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), h.23

[5] Apridar, *Ibid*, h.20

[6] Apridar, *Ibid*, h.20

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam pemikiran neoliberalisme, politik adalah keputusan-keputusan yang menawarkan nilai-nilai, sedangkan secara bersamaan neoliberalisme menganggap hanya satu cara rasional untuk mengukur nilai, yaitu pasar. Semua pemikiran diluar rel pasar dianggap salah.[7]

Neoliberalisme di lain sisi sangat percaya bahwa institusi dan rezim internasional akan berpengaruh signifikan dalam hubungan internasional. Mereka percaya bahwa dengan adanya derajat interdependensi yang tinggi, negara – negara akan sering membentuk institusi – institusi internasional untuk menghadapi masalah – masalah bersama. Kaum neoliberalis juga berpendapat bahwa institusi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa dan rezim internasional seperti rezim perdagangan melalui WTO akan dapat membantu memajukan kerjasama internasional sekaligus menjadi fasilitator hubungan antar negara.[8]

Neoliberalisme bertujuan mengembalikan kepercayaan pada kekuasaan pasar, dengan pembenaran mengacu pada kebebasan. Seperti pada contoh kasus upah pekerja, dalam pemahaman neoliberalisme pemerintah tidak berhak ikut campur dalam penentuan gaji pekerja atau dalam masalah-masalah tenaga kerja sepenuhnya ini urusan antara si pengusaha pemilik modal dan si pekerja. Pendorong utama kembalinya kekuatan kekuasaan pasar adalah privatisasi aktivitas-aktivitas ekonomi, terlebih pada usaha-usaha industri yang dimiliki atau dikelola pemerintah.[9]

---

[7] Apridar, *Ibid*, h. 24
[8] Budi Winarno, *Globlalisasi dan Krisis Demokrasi*, (Yogyakarta: MedPress, 2007), h. 119
[9] Apridar, *Ibid*, h.21

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pendirian neo-liberalisme pada prinsipnya tidak bergeser dari liberalisme sesuai dari apa yang dipikirkan oleh Adam Smith dalam *The Wealth of Nations (1776*). Akan tetapi, krisis yang berkepanjangan menimpa kapitalisme awal abad XIX, yang berdampak depresi ekonomi tahun 30-an. Akibatnya, tenggelamlah liberalisme dan pendulum beralih pada perbesaran peran pemerintah sejak Roosevelt dengan New Deal-nya pada tahun 1935. Untuk itu, kapitalisme memerlukan strategi baru untuk mempercepat pertumbuhan dan 'akumulasi kapital'. Maka strategi yang ditempuh adalah menyingkirkan segenap rintangan investasi dengan pasar bebas, perlindungan hak milik intelektual, *good governance*, penghapusan subsidi dan program proteksi pada rakyat, deregulasi, dan penguatan *civil society* dan anti korupsi, dan lain sebagainya. Untuk itu, diperlukan suatu tatanan perdagangan global maka sejak itulah gagasan globalisasi dimunculkan. Dengan demikian, globalisasi pada dasarnya berpijak pada kebangkitan kembali liberalisme, suatu paham yang dikenal sebagai neoliberalisme.[10]

Globalisasi pada dasarnya merupakan proses pesatnya perkembangan kapitalisme yang ditandai dengan globalisasi pasar, investasi, dan proses produksi dari Perusahaan-perusahaan Trans-nasional *(TNCs/ Trans National Corporations)* dengan dukungan Lembaga-lembaga Finansial Internasional *(IFIs/International Financial Institusions)* yang diatur oleh Organisasi Perdagangan Global *(WTO/World Trade Organization).* Globalisasi muncul bersamaan dengan fenomena runtuhnya kapitalisme Asia Timur. Era baru tersebut mencoba

[10] Mansour Fakih, *Neoloberalisme dan Globalisasi*, Ekonomi Politik Digital Journal Al-Manar Edisi I/2004, h. 3

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

meyakinkan rakyat miskin di Dunia Ketiga seolah-olah merupakan arah baru yang menjanjikan harapan kebaikan bagi umat manusia dan menjadi keharusan sejarah manusia di masa depan. Namun globalisasi juga melahirkan kecemasan bagi mereka yang memikirkan permasalahan sekitar pemiskinan rakyat dan marginalisasi rakyat, serta persoalan keadilan sosial. Sementara itu, negara miskin dunia masih menghadapi krisis hutang dan krisis '*over* produksi' warisan pembangunan tahun 80-an, serta akibat dampak negatif dari kampanye internasional yang dulu dikumandangkan oleh *The Bretton Woods Institutions* tentang model pembangunan ekonomi 'pertumbuhan', suatu paradigma pembangunan mainstream yang berakar pada paradigma dan teori ekonomi neo-klasik dan modernisasi. Namun di pihak lain muncul gejala lain yakni makin menguatnya peran organisasi non pemerintah (ornop) dan gerakan sosial secara global, serta bangkitnya masyarakat sipil (*civil society*) baik di Utara maupun Selatan.[11]

Seperti telah disinggung sebelumnya, sebelum krisis *developmentalism* terjadi, suatu *mode of domination* baru telah disiapkan yakni era globalisasi, sebagai 'periode ketiga' yang ditandai dengan liberalisasi segala bidang yang dipaksakan melalui '*structural adjustment program'* oleh lembaga finansial global, dan disepakatinya oleh rezim GATT (*General Agreement on Tariff and Trade*) dan Perdagangan Bebas (*Free Trade*) suatu organisasi global yang dikenal dengan WTO. Sejak saat itulah suatu era baru telah muncul menggantikan era

[11] Mansour Fakih, *Ibid*, h. 5

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebelumnya, dan dengan begitu dunia memasuki periode yang dikenal dengan globalisasi.[12]

Secara lebih tegas yang dimaksud dengan globalisasi adalah proses pengintegrasian ekonomi nasional kepada sistem ekonomi dunia berdasarkan keyakinan perdagangan bebas, yang sesungguhnya telah dicanangkan sejak zaman kolonialisme.[13] Para teoretisi kritis sejak lama sudah meramalkan perkembangan kapitalisme akan berkembang menuju pada dominasi ekonomi, politik, dan budaya berskala global setelah perjalanan panjang melalui era kolonialisme. Jadi dengan demikian 'globalisasi' secara sederhana dipahami sebagai suatu proses pengintegrasian ekonomi nasional bangsa-bangsa ke dalam suatu sistem ekonomi global. Namun, jika ditinjau dari sejarah perkembangan ekonomi, globalisasi pada dasarnya merupakan salah satu fase dari perjalanan panjang perkembangan kapitalisme liberal, yang secara teoretis sebenarnya telah dikembangkan oleh Adam Smith. Meskipun globalisasi dikampanyekan sebagai era masa depan, yakni suatu era yang menjanjikan 'pertumbuhan' ekonomi secara global dan akan mendatangkan kemakmuran global bagi semua, namun sesungguhnya globalisasi adalah kelanjutan dari *kolonialisme* dan *developmentalism* sebelumnya. Globalisasi yang ditawarkan sebagai jalan keluar bagi kemacetan pertumbuhan ekonomi bagi dunia ini, sejak awal oleh kalangan ilmu sosial kritis dan yang memikirkan perlunya tata dunia ekonomi yang adil serta kalangan yang

[12] Shiva, Vandana (1995), *'Gender, Environment, and Sustainable Development'*, dalam Reardon G., Power and Process, Oxford: Oxfam Publication
[13] Mansour Fakih, *Ibid*, h. 7

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melakukan pemihakan terhadap yang lemah, telah mencurigainya sebagai bungkus baru dari imperialisme dan kolonialisme.[14]

Globalisasi menuntut Cina menjalin berbagai hubungan kerjasama ekonomi dengan negara lain dan ikut serta dalam berbagai organisasi internasional. Hubungan kerjasama ekonomi ini dapat berbentuk hubungan dagang (ekspor-impor) atau jalinan kerjasama dalam membentuk sebuah pasar bebas. Selain itu saat ini cina telah terdaftar dalam berbagai organisasi internasional. Salah satu organisasi internasional yang terpenting dan disambut suka cita oleh rakyat Cina adalah saat Cina bergabung dengan *World Trade Organization* (WTO). Cina berasumsi bahwa dengan bergabung dengan WTO tersebut Cina dapat meraih keuntungan ekonomi, yaitu sebagai sarana untuk mencapai industrialisasi yang cepat. [15]

Pendukung anti globalisasi adalah pihak yang paling lantang menentang neoliberalisme, terutama sekali dalam implementasi "pembebasan arus modal" akan tetapi tidak dalam hal adanya pembebasan arus tenaga kerja. Salah satu pendapat mereka, kebijakan neoliberal hanya mendorong sebuah "perlombaan menuju dasar" dalam arus modal menuju titik terendah untuk standar lingkungan dan buruh.

---

[14] Mansour Fakih, *Ibid*, h. 7-8

[15] Published by Indah Maisuri on Juny 9, 2013, http://www.scribd.com/doc/148660375/3024-2929-1-PB-pdf, diakses pada tanggal 10 maret 2015 pukul: 17.10

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

## B. Asean Free Trade Area (AFTA)

### i. Asumsi Dasar Perjanjian AFTA

*ASEAN Free Trade Area* (AFTA) merupakan wujud dari suatu perjanjian integrasi ekonomi yang didalamnya hambatan-hambatan (seperti tarif dan kuota) diantara negara – negara anggotanya dihapuskan.[16] Nantinya barang dan jasa akan diperdagangkan secara bebas diantara negara – negara anggotanya. Dibawah perjanjian ini, setiap partisipan akan berjuang untuk meraup keuntungan dengan mengkhususkan diri pada produksi barang dan jasa yang terhadapnya barang tersebut memiliki keunggulan komparatif dan mengimpor barang dan jasa yang terhadap negara tersebut memiliki kelemahan komparatif. Setiap anggota tetap memberlakukan hambatan – hambatan perdagangan terhadap negara – negara yang bukan anggota.[17]

Justifikasi secara teoris untuk perdagangan bebas berasal dari karya ekonom David Ricardo seabad yang lalu yang menyebutkan bahwa perdagangan bebas adalah menguntungkan dengan berlandaskan pada gagasan keunggulan komperatif, yang menyatakan bahwa meskipun sebuah negara sanggup menghasilkan semua barang pada harga – harga yang lebih rendah dari negara lain, perdagangan masih tetap menguntungkan kedua negara tersebut berdasarkan biaya komperatif. Perusahaan – perusahaan multinasional menggunakan peluang perdagangan bebas untuk menjadi produsen barang yang paling murah. Pencarian keunggulan absolut ini membuat tingkat upah tetap berada dibawah, membawa

---

[16] Julius Latumaerisa, *Perekonomian Indonesia dan Dinamika Ekonomi Global*, (Jakarta; Mitra Wacana Media, 2015), h.81

[17] Henry Simamora, *Managemen Pemasaran Internasional*, (Jakarta;Salemba Empat, 2000), h. 23

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akibat kondisi kerja yang tidak nyaman dan tidak ramah lingkungan. Kompetisi menjadi kata kunci dalam konsep ini[18].

**ii. Sejarah ASEAN Free Trade Area (AFTA)**

AFTA dibentuk pada waktu Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke IV di Singapura tahun 1992. Awalnya AFTA ditargetkan akan dicapai dalam waktu 15 tahun (1993-2008), kemudian dipercepat menjadi tahun 2003, dan terakhir dipercepat lagi menjadi tahun 2002. Skema *Common Effective Preferential Tariffs For ASEAN Free Trade Area* ( CEPT-AFTA) merupakan suatu skema untuk mewujudkan AFTA melalui : penurunan tarif hingga menjadi 0-5%, penghapusan pembatasan kwantitatif dan hambatan-hambatan non tarif lainnya. Perkembangan terakhir yang terkait dengan AFTA adalah adanya kesepakatan untuk menghapuskan semua bea masuk impor barang bagi Brunei Darussalam pada tahun 2010, Indonesia, Malaysia, Philipina, Singapura dan Thailand, dan bagi Kamboja, Laos, Myanmar dan Vietnam pada tahun 2015[19].

Pada pertemuan tingkat Kepala Negara ASEAN (*ASEAN Summit*) ke-4 di Singapura pada tahun 1992, para kepala negara mengumumkan pembentukan suatu kawasan perdagangan bebas di ASEAN (AFTA) dalam jangka waktu 15 tahun.

Ada beberapa tujuan didirikannya perjanjian AFTA ini, antara lain yang *pertama,* AFTA bisa menjadikan kawasan ASEAN sebagai tempat produksi yang kompetitif sehingga produk ASEAN memiliki daya saing kuat di pasar global.

[18] Henry Simamora, *Ibid*, h.37
[19] http://www.tarif.depkeu.go.id/Others/?hi=AFTA, diakses 30 September 2015, Pukul 22.00 WIB

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

*Kedua*, menarik lebih banyak investasi Asing Langsung atau *Foreign Direct Investment* (FDI). Dan *Ketiga*, Juga mampu meningkatkan perdagangan antar negara anggota ASEAN (*intra-ASEAN Trade*).

**iii. Manfaat Perjanjian ASEAN Free Trade Area (AFTA) bagi Indonesia**

Dengan tujuan tersebut diatas sudah barang tentu nantinya bagi negara-negara anggotanya, khususnya Indonesia, akan mendapatkan banyak manfaat dari di implementasikannya Pasar Bebas ini, manfaat tersebut seperti;

1. Peluang pasar yang semakin besar dan luas bagi produk Indonesia, dengan penduduk sebesar ± 500 juta dan tingkat pendapatan masyarakat yang beragam;
2. Biaya produksi yang semakin rendah dan pasti bagi pengusaha/produsen Indonesia yang sebelumnya membutuhkan barang modal dan bahan baku/penolong dari negara anggota ASEAN lainnya dan termasuk biaya pemasaran;
3. Pilihan konsumen atas jenis/ragam produk yang tersedia di pasar domestik semakin banyak dengan tingkat harga dan mutu tertentu;
4. Kerjasama dalam menjalankan bisnis semakin terbuka dengan beraliansi dengan pelaku bisnis di negara anggota ASEAN lainnya.

Namun meski ada beberapa manfaat, diadakannya perjanjian AFTA ini tentu merupakan tantangan besar bagi Indonesia sendiri intuk bisa menghadapi dengan baik dan bersaing dengan negara-negara lain anggota AFTA seperti contoh pengusaha/produsen Indonesia akan dituntut terus menerus dapat meningkatkan kemampuan dalam menjalankan bisnis secara profesional guna

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dapat memenangkan kompetisi dari produk yang berasal dari negara anggota ASEAN lainnya baik dalam memanfaatkan peluang pasar domestik maupun pasar negara anggota ASEAN lainnya[20].

**C. Teori Kritis**

Upaya analisis untuk membongkar faktor-faktor di balik ketidaksiapan dan minimnya langkah pemerintah Indonesia menuju Masyarakat Ekonomi ASEAN menurut Penulis adalah dilandaskan pada Teori Kritis (*Critical Theory*), sebagai salah satu paradigma penting dalam Ilmu Hubungan Internasional. Teori kritis mulai berpengaruh dalam Hubungan Internasional terutama sejak pertengahan 1980-an. Pendekatan ini membuat kita untuk secara mendalam memikirkan praktik kehidupan sehari-hari dan hubungan di antara 'teori' dengan cara kita bertindak.[21] Pandangan utama teori kritis, mungkin secara ringkas dapat dirangkum dalam sebuah perkataan Karl Marx yang terkenal mengenai tugas seorang filsuf tidak hanya untuk menggambarkan dunia, tetapi yang penting adalah bagaimana merubahnya. Dalam pandangan teori kritis, kaum intelektual terlibat dalam kegiatan memproduksi pengetahuan atau kebenaran mengenai dunia, baik untuk mendukung hubungan sosial yang dominan atau untuk menantang, bahkan menggantikannya. Termasuk di dalamnya institusi sosial dan

[20] http://www.tarif.depkeu.go.id/Others/?hi=AFTA, diakses 30 September 2015, Pukul 22.00 WIB
[21] Jill Steans & Lloyd Pettiford, *International Relations: Perspectives and Themes* (London: Pearson Education, 2001), hlm 101.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

praktik-praktik yang menciptakan serta melestarikan ketidakadilan. Dalam konteks ini, pengetahuan adalah ada kaitannya dengan bersifat sosial dan politik[22]

Hubungan erat antara teori atau gagasan dengan praktik sosial yang aktual merupakan persoalan penting dalam pandangan teori kritis. Hal ini terjadi karena adanya sebuah kontradiksi antara gagasan dominan mengenai sifat dasar sistem sosial dan ekonomi dengan kondisi aktual atau material kehidupan manusia. Dalam sudut pandang kelas kapitalis, liberalisme benar-benar dapat menggambarkan realitas kehidupan mereka. Namun demikian, bagi kelas pekerja yang termiskinkan, realitas kehidupan sehari-hari mereka sangat berbeda, di mana mereka lebih suka menggunakan istilah opresif, atau eksploitatif dan melihat diri mereka hanya memiliki sedikit pilihan dan kesempatan untuk mengendalikan kehidupan mereka sendiri. Dengan demikian, liberalisme tidak memberikan gambaran mengenai sebuah kebenaran akan sifat dasar manusia dan masyarakat, gagasan ini hanya merefleksikan sudut pandang dari kelas yang dominan.[23]

Ciri utama dari perspektif teori kritis dalam disiplin hubungan internasional dapat disederhanakan ke dalam enam asumsi. *Pertama*, dunia seharusnya dipahami terutama dalam konteks kekuatan sosial dan ekonomi utama yang dihasilkan oleh kapitalisme, yang saat ini memiliki ruang lingkup internasional, bahkan global. *Kedua*, negara dan institusi juga harus dipahami dalam konteks fungsi yang dimainkannya dalam mendukung kapitalisme global. *Ketiga*, sementara dunia "nyata" itu ada, pemahaman kita tentang dunia selalu diarahkan melalui gagasan, konsep dan teori yang merupakan produk dari

[22] Dodi Mantra, *Hegemoni & Diskursus Neoliberalisme*, (Bekasi: Mantra Press, 2011) h.16
[23] Dodi Mantra, Ibid, h.17

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemikiran dan refleksi kritis. *Keempat*, semua pengetahuan bersifat ideologis, yaitu merupakan sebuah refleksi nilai-nilai, gagasan, dan terutama kepentingan dari kelompok sosial tertentu. *Kelima*, budaya dan ideologi merupakan suatu kekuatan yang penting yang bekerja untuk mendukung atau menentang tatanan ekonomi dan sosial yang berlaku. *Keenam*, hubungan internasional atau politik internasional, terdiri dari suatu pertentang di antara beragam kelompok dan pergerakan sosial, atau kekuatan sosial, yang di satu sisi memiliki kepentingan untuk mempertahankan status quo, sementara di sisi lain berupaya melakukan perlawanan untuk mengubahnya.[24]

Dengan demikian, pendekatan teori kritis memandang bahwa gagasan mengenai integrasi ekonomi kawasan berlandaskan pada liberalisme tidak terlepas dari kepentingan kelompok – kelompok sosial dan ekonomi tertentu, terutama kelas pemilik modal. Sementara peranan pemerintah memainkan fungsi tertentu untuk mendukung keberadaan sistem kapitalis di tingkat kawasan. Beragam upaya liberalisasi ekonomi yang digalang pemerintah Indonesia di tingkat ASEAN dapat dipahami sebagai suatu upaya untuk melestarikan eksistensi kapitalisme regional. Dan minimnya persiapan yang dilakukan pemerintah dalam menghadapi integrasi ekonomi regional dipengaruhi oleh gagasan liberalisme yang diyakini merupakan gambaran dari realitas atau kebenaran akan keadaan sosial dan ekonomi, sehingga muncul optimisme di kalangan pemerintah akan kesiapan ekonomi Indonesia dalam menghadapi terwujudnya Masyarakat Ekonomi ASEAN di tahun 2015.

[24] Dodi Mantra, *Ibid*, h.18

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Secara lebih ringkasnya, analisis ini menggunakan pendekatan Gramscian-Foucauldian, yaitu sebuah model analisa yang dikembangkan oleh Richard Peet, dalam bukunya yang berjudul *The Unholy Trinity: the IMF, World Bank and WTO.* Pendekatan ini mengkombinasikan konsep hegemoni dan *civil society* Antonio Gramsci dan konsep diskursus Michel Foucault, menunjukkan bahwa kebijakan ekonomi tidak berasal dari kemampuan ilmu pengetahuan untuk mencerminkan struktur realitas sosial yang pasti didalam sebuah struktur pernyataan kebenaran yang disebut sebagai teori pasti. Sebaliknya, kebijakan diproduksi secara sosial oleh sebuah komunitas ahli yang menyepakati, lebih melalui konvensi atau persuasi politik ketimbang latar belakang faktual, untuk menghasilkan sebuah tipe pemikiran dan perkataan tertentu yang bersifat 'rasional'.[25]

*Civil society* atau masyarakat sipil, menurut Gramsci adalah sebuah sistem sosial dan institusi budaya (keluarga, gereja, sekolah, dan lain – lain) yang berada di luar dan paralel terhadap negara di dalam sebuah konsepsi luas mengenai 'superstruktur politik dan sipil'. Gramsci meyakini bahwa hegemoni ideologi terbentuk terutama oleh masyarakat sipil ketimbang institusi negara. Dalam formulasi ini, hegemoni merupakan sebuah konsepsi tentang realitas, di sebarluaskan oleh institusi sipil, yang menginformasikan nilai – nilai, kebiasaan dan prinsip – prinsip spiritual, yang membentuk konsensus terhadap status *quo* di dalam semua strata masyarakat. Hegemoni merupakan sebuah pandangan terhadap dunia, yang ketika diinternalisasikan menjadi 'pemikiran yang masuk

[25] Richard Peet, *Unholy Trinity: The IMF, World Bank and WTO 1st Edition*, (London: Zed Books, 2003), h.16.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akal' (*common sense*). Termasuk di dalamnya formasi perilaku ekonomi di dalam masyarakat. Dengan demikian, Gramsci memandang rasionalitas ekonomi memenuhi kebutuhan materi dengan membentuk sebuah kompleks keyakinan, dari mana tujuan-tujuan kongkrit di ajukan kepada kesadaran kolektif.[26]

Berdasarkan konsep Gramsci ini, Richard Peet kemudian memindahkan analisis mengenai kebijakan ekonomi dari level ideologis (produksi sosio-politik mengenai apa yang dipikirkan manusia) ke level hegemoni (produksi sosio-kultural mengenai cara manusia berpikir). Wilayah kebijakan terkait erat dengan sistem produksi pemikiran ekonomi 'yang baik' yang terformalisasikan secara partikular. Ini merupakan sebuah area produksi kultural-politik yang dihuni oleh individu yang berpengalaman dan terlatih (para ahli) dan institusi yang mapan dan ditopang oleh pendanaan dalam jumlah besar, departemen pemerintah, *think tank*, lembaga-lembaga yang ditopang kemapanan finansial dan sejenisnya.[27]

Model analisa ini kemudian di kombinasikan lagi dengan konsep diskursus Michael Foucault untuk menganalisa bagaimana proses hegemoni diterjemahkan ke dalam praktik. Foucault melihat bahwa ilmu pengetahuan manusia sebagai sebuah sistem diskursus yang berdasarkan aturan. Diskursus adalah pernyataan yang terperinci, rasional dan terorganisasi, yang dibuat oleh para ahli.[28] Foucault menemukan sebuah tipe yang tidak diperhatikan sebelumnya mengenai fungsi linguistik, atau biasa disebut *"serious speech act",* atau pernyataan dengan prosedur validasi yang dibuat di dalam komunitas para ahli. Pada satu titik,

---

[26] Antonio Gramsci, *Selection from the Prison Notebooks*, (New York: International Publisher, 1971), h. 412-413
[27] Richard Peet, *Unholy Trinity*, h.16.
[28] Michel Foucault, *The Archaeology of Knowledge*, (New York: Harper and Row, 1972).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tindakan berbicara (*speech act*) ini menunjukkan keteraturan sebagai apa yang disebut Foucault sebagai formasi diskursif. Formasi ini memiliki sistem aturan internal yang menentukan apa yang dikatakan dan mengenai apa. Diskursus memiliki struktur sistematis yang dapat dianalisa secara arkeologios (mengidentifikasi unsur-unsur dan relasi utama yang membentuk pernyataan secara keseluruhan) dan genealogis (bagaimana diskursus dibentuk oleh institusi kekuasaan). Dengan demikian, diskursus merupakan sistem pernyataan yang rasional dan terorganisasi, ditopang oleh prosedur validasi, dan diikat ke dalam formasi oleh komunitas para ahli.[29]

Ketika klaim atas rasionalitas itu telah diterima secara luas, dan ketika sekelompok ahli dianggap membicarakan kebenaran, diskusi selanjutnya akan terbatas pada topik ekonomi dalam cakupan yang sempit, berpikir dengan sekumpulan teori yang telah ditentukan, menggunakan sekumpulan istilah yang ditentukan. Di dalam sistem pemikiran yang sempit ini, analisis formal menggunakan sebuah kode intelektual yang memperinci kategori-kategori dan istilah-istilah yang disetujui. Secara sederhana menggunakan istilah-istilah ini membatasi apa yang dapat dipikirkan, dikatakan dan dibayangkan. Karenanya, kedalaman dari sebuah hegemoni terletak di dalam kemampuan dari sebuah formasi diskursif untuk memperinci parameter praktis, realistis dan masuk akal di antara sekelompok teorisi, praktisi politik dan pembuat kebijakan.[30]

Menurut Richard Peet, bagian penting dari pembatasan pemikiran dan ekspresi tersebut terletak pada produksi institusional mengenai apa yang dapat

[29] Richard Peet, *Unholy Trinity*, h.16.
[30] *Ibid*, h. 17

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

disebut sebagai sebuah ’praktikalitas’, melalui mana kita memaknai sebuah pemikiran sosial dari isi dan batasan pragmatis. Terkait dengan ranah kebijakan, hal ini merupakan sebuah bentuk kebijakan yang tepat sebagai respon atas situasi ekonomi tertentu yang berasal dari sekumpulan teori dan cakupan alternatif yang terbatas yang dirancang secara sosial dan institusional dapat dipraktikkan (praktis). Posisi praktis ini dibentuk berdasarkan kesepakatan di antara para ahli yang menentukan suatu keadaan yang tidak terhindarkan (*inevitability*) dan optimalitas, tergantung daripada tingkat keparahan dari krisis yang dihadapi.[31]

Keadaan inilah yang sangat sering dihadapi negara berkembang ketika berhadapan dengan kondisionalitas yang diajukan IMF, dengan kondisi di mana tidak terdapat alternatif lain, sehingga tidak dapat terhindarkan. Dan ketika berhadapan dengan kegagalan dari kebijakan kondisionalitas tersebut, maka kondisi yang mendominasi adalah optimalitas, bahwa apa yang telah dilaksanakan adalah yang terbaik dan maksimal. Keberhasilan dari hegemoni ini terletak pada strategi untuk mengkonversikan politik, yang merepresentasikan kepentingan kelas tertentu, dan terdiri dari sekumpulan opini esensial, ke dalam sebuah praktikalitas yang berasal dari teori dan yang tampak mengekspresikan kebaikan bersama ketimbang kepentingan sepihak.[32]

Dengan kata lain, model analisa Gramscian-Foucauldian yang di kembangkan Richard Peet, menunjukkan bahwa hegemoni yang di produksi secara kultural-politik oleh suatu komunitas tertentu membentuk diskursus yang diformasikan ke dalam batasan – batasan spesifik mengenai tindakan dan

[31] Richard Peet, *Unholy Trinity*, h.17
[32] Richard Peet, *Unholy Trinity*, h.18

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemikiran sehingga menciptakan praktik dalam bentuk kebijakan yang ’dianggap’ baik, dalam suatu kondisi inevitabilitas dan optimalitas. Optimisme pemerintah Indonesia akan kesiapan perekonomian negeri ini dalam menghadapi integrasi ekonomi ASEAN, mempengaruhi minimnya upaya penyiapan perekonomian Indonesia secara lebih matang dalam sektor-sektor yang sangat penting. Keyakinan pemerintah indonesia akan ideologi neoliberalisme mencerminkan eksistensi hegemoni yang melahirkan praktik-praktik kebijakan yang bertumpu pada peranan entitas pasar, sehingga pemerintah tidak merasa perlu memainkan peranan yang strategis dalam mendorong kemajuan ekonomi, dengan asumsi melalui liberalisasi daya saing ekonomi akan berkembang dengan sendirinya melalui mekanisme pasar yang bekerja tanpa terlihat. Hegemoni dan diskursus neoliberalisme berada di balik langkah pemerintah Indonesia menuju terwujudnya Masyarakat Ekonomi ASEAN.

## D. Usaha Menengah Kecil & Mikro (UMKM)

### i. Pengertian Usaha Kecil Menengah

Untuk memperoleh gambaran yang lebih luas dan komprehensif maka perlu dipahami terlebih dahulu pengertian atau definisi dari UMKM itu sendiri, agar kita mempunya persepsi yan sama tentang apa itu Usaha Menengah Kecil & Mikro (UMKM). Ada acuan definisi yang digunakan berbagai instansi di Indonesia. Karena memang dalam perekonomian Indonesia UMKM merupakan usaha yang memiliki jumlah paling besar dan terbukti tahan terhadap berbagai macam goncangan krisis ekonomi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) ada beberapa kriteria yang dipergunakan untuk mendefinisikan pengertian dan kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Menurut Rahmana[33], bebrapa lembaga atau instansi bahkan memberikan definisi tersendiri pada UKM , diantaranya adalah Kementrian Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menegkop dan UKM), Badan Pusat Statistik (BPS), Keputusan Menteri Keuangan No 316/KMK.016/1994 tanggal 27 Juni 1994. Definisi UKM yang disampaikan berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Menurut Kementrian Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menegkop dan UKM), bahwa yang dimaksud dengan Usaha Kecil (UK), termasuk Usaha Mikro (UMI), adalah entitas usaha yang mempunyai memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, dan memiliki penjualan tahunan paling banyak Rp 1.000.000.000. Sementara itu, Usaha Menengah (UM) merupakan entitas usaha milik warga negara Indonesia yang memiliki kekayaan bersih lebih besar dari Rp 200.000.000 s.d. Rp 10.000.000.000, tidak termasuk tanah dan bangunan.

Badan Pusat Statistik (BPS) memberikan definisi UKM berdasarkan kuantitas tenaga kerja. Usaha kecil merupakan entitas usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja 5 s.d 19 orang, sedangkan usaha

[33] Arief Rahmana, Usaha Kecil dan Menengah (UKM), Informasi terdepan tentang Usaha Kecil Menengah, http://infoukm.wordpress.com, diakses pada tanggal 28 Maret 2015 pukul 11:26

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menengah merupakan entitias usaha yang memiliki tenaga kerja 20 s.d. 99 orang. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 316/KMK.016/1994 tanggal 27 Juni 1994, usaha kecil didefinisikan sebagai perorangan atau badan usaha yang telah melakukan kegiatan/usaha yang mempunyai penjualan/omset per tahun setinggi-tingginya Rp 600.000.000 atau aset/aktiva setinggitingginya Rp 600.000.000 (di luar tanah dan bangunan yang ditempati) terdiri dari : (1) badang usaha (Fa, CV, PT, dan koperasi) dan (2) perorangan (pengrajin/industri rumah tangga, petani, peternak, nelayan, perambah hutan, penambang, pedagang barang dan jasa).

**ii. Kriteria UKM**

Setelah kita memahami cakupan atau ruang lingkup usaha kecil, menengah dan mikro (UMKM) maka dibutuhkan pemahaman lanjutan tentang karakteristik usaha kecil, menengah dan mikro (UMKM), secara umum karakteristik usaha kecil, menengah dan mikro (UMKM) adalah sebagai berikut:

- Manajemen berdiri sendiri, dengan kata lain tidak ada pemisahan yang tegas antara pemilik dengan pengelola perusahaan. Pemilik adalah sekaligus pengelola dalam UKM.
- Modal disediakan oleh seorang pemilik atau sekelompok kecil pemilik modal.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- Daerah operasinya umumnya lokal, walaupun terdapat juga UKM yang memiliki orientasi luar negeri, berupa ekspor ke negara-negara mitra perdagangan.
- Ukuran perusahaan, baik dari segi total aset, jumlah karyawan, dan sarana prasarana yang kecil.[34]

**E. Masyarakat Ekonomi ASEAN**

Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) pada dasarnya adalah bentuk integrasi ekonomi regional yang telah dimuali beberapa tahun silam, tepatnya saat pembentukan AFTA tahun 1992. Kerangka besar dalam integrasi ekonomi regional kemudian dirumuskan pada *Asean Summit* tahun 1997 di Kuala Lumpur yang menghasilkan visi Asean 2020, yaitu tercapainya suatu kawasan yang stabil, makmur, berdaya saing tinggi, dengan pertumbuhan ekonomi yang berimbang serta berkurangnya kemiskinan dan kesenjangan sosial ekonomi. Lalu dalam Asean Summit di Bali tahun 2003, ditetapkan 3 pilar guna merealisasikan visi Asean tersebut yaitu; Asean *Economic Community*-Masyarakat Ekonomi Asean, *Asean Security Community* dan *Asean Socio-Cultural Community*. [35]

Kesepakatan ini bertujuan meningkatkan daya saing ASEAN serta bisa menyaingi Tiongkok dan India untuk menarik investasi asing. Modal asing dibutuhkan untuk meningkatkan lapangan pekerjaan dan kesejahteraan warga ASEAN. Namun pada KTT selanjutnya di Bali Oktober 2003, Petinggi ASEAN mendeklarasikan pembentukan MEA yang semula direncanakan akan dimulai

[34] Julius Latumaerissa, *Perekonomian Indonesia dan Dinamika Ekonomi Global*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015), h.411
[35] *Ibid*, h.535

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tahun 2020 mendatang, di percepat menjadi tahun 2015[36]. Kerjasama ekonomi ASEAN ini mengarah kepada pembentukan komunitas ekonomi ASEAN yang fungsinya sebagai suatu integrasi ekonomi kawasan ASEAN agar menjadi kawasan yang stabil, makmur dan berdaya saing tinggi. Selain itu MEA yang akan diberlakukan pada Desember 2015 ini juga bukan tanpa alasan dan pertimbangan yang matang, beberapa pertimbangan yang mendasari hal tersebut adalah: i) potensi penurunan biaya produksi di Asean untuk barang konsumsi hingga 20 persen sebagai dampak integrasi ekonomi. ii) peningkatan kemampuan kawasan dengan adanya implementasi standar dan praktik international. iii) peningkatan kualitas infrastruktur kawasan seiring dengan integrasi transportasi, telekomunikasi dan energi. iv) peningkatan manfaat bagi swasta Asean.[37]

Pada saat yang sama, MEA akan mengatasi kesenjangan pembangunan dan mempercepat integrasi terhadap Negara Kamboja, Laos, Myanmar dan Vietnam melalui *Initiative for ASEAN Integration* dan inisiatif regional lainnya. Bentuk Kerjasamanya adalah :

1. Pengembangan sumber daya manusia dan peningkatan kapasitas
2. Pengakuan kualifikasi profesional
3. Konsultasi lebih dekat pada kebijakan makro ekonomi dan keuangan
4. Langkah-langkah pembiayaan perdagangan
5. Meningkatkan infrastruktur
6. Pengembangan transaksi elektronik melalui e-ASEAN

[36] Kompas, *Tinjauan Kompas, Menatap Indonesia 2015, Antara Harapan dan Tantangan*, (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2015), hlm. 78
[37] Julius Latumaerissa, *Ibid*, h.536

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7. Mengintegrasikan industri di seluruh wilayah untuk mempromosikan sumber daerah
8. Meningkatkan keterlibatan sektor swasta untuk membangun Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

Pentingnya perdagangan eksternal terhadap ASEAN dan kebutuhan untuk komunitas ASEAN secara keseluruhan untuk tetap melihat ke depan, pilar utama MEA adalah:

1. Pasar dan basis produksi tunggal
2. Kawasan ekonomi yang kompetitif
3. Wilayah pembangunan ekonomi yang merata
4. Daerah terintegrasi penuh dalam ekonomi global.

Pilar ini saling berkaitan kuat. Dengan Memasukkan unsur-unsur yang dibutuhkan dari masing-masing pilar dan harus memastikan konsistensi dan keterpaduan dari unsur-unsur serta pelaksanaannya yang tepat dan saling mengkoordinasi di antara para pemangku kepentingan yang relevan.

Salah satu pilar MEA adalah pembentukan pasar tunggal ASEAN pada 2015. Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang akan menjadikan ASEAN pasar tunggal dan basis produksi kompetitif di kawasan, juga bentuk dari respons ASEAN terhadap bangkitnya ekonomi Cina dan India.

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop dan UKM) serta Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mengungkapkan skeptisisme mereka. Kemenkop dan UKM mengingatkan mayoritas sektor industri dalam negeri tak yakin siap bersaing dengan pesaing di ASEAN, apalagi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Cina. Kemenkop dan UKM juga mengingatkan lemahnya koordinasi internal di antara pemerintah sendiri dan lemahnya diseminasi informasi kepada public terkait perdagangan bebas bilateral (BTA) ini. Bahkan banyak kalangan di pemerintahan sendiri tak paham kebijakan spesifik terkait BTA.[38]

MEA bertujuan untuk membangun kemitraan untuk kemajuan yang akan meningkatkan kualitas kehidupan warga ASEAN dengan tercapainya integrasi regional yang melalui upaya kolektif masyarakat ASEAN. Realisasi MEA pada tahun 2015 akan membuka peluang lebih besar bagi pertumbuhan sosial ekonomi. Diantara manfaat diberlakukannya MEA adalah:

- Pilihan barang dan jasa yang lebih besar bagi konsumen melalui peningkatan perdagangan intra-regional;
- Skala ekonomi yang lebih besar bagi dunia usaha dan industri, yang dapat mendorong peningkatan produktivitas dan pengurangan biaya produksi, sehingga menghasilkan harga barang yang lebih kompetitif;
- Penurunan biaya produksi berdampak positif terhadap konsumen karena harga barang dan jasa menjadi lebih rendah;
- Permintaan yang lebih besar untuk barang dan jasa akan menciptakan lapangan kerja di berbagai industri seperti manufaktur, transportasi, logistik dan komunikasi;
- Peningkatan perdagangan dan investasi akan mendorong kewirausahaan dan inovasi yang lebih baik di bidang produk dan jasa, sehingga mampu

[38] Sri Hartati Samhadi, *Indonesia dan Globalisasi*, dalam *Tinjauan Kompas, Menatap Indonesia 2014, Tantangan, Prospek Politik dan Ekonomi Indonesia,* (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2014), h.70

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menghasilkan jenis produk, kualitas dan efisiensi yang lebih baik, dan menguntungkan konsumen;

- Peningkatan integrasi ekonomi akan memperkuat jaringan bisnis di ASEAN, membangun pertumbuhan dan kemakmuran;
- Tingkat penyerapan tenaga kerja yang lebih tinggi di ASEAN akan memberikan kontribusi dalam membangun kelas menengah yang lebih besar di kawasan, sehingga mengurangi kesenjangan antara kaya dan miskin. Hal ini akan menghasilkan stabilitas sosial melalui penguatan pasar dan daya beli barang dan jasa konsumen.[39]

[39] Sri Hartati Samhadi, *Ibid*, h.72

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id